

# DINAMIKA KEKUASAAN LOKAL DAN PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM KONTEKS DESENTRALISASI PASCA-ORDE BARU (Studi pada YLBHI-LBH Manado)

Muhamad. Taufik Poli  
[taufik.poli@unpi.ac.id](mailto:taufik.poli@unpi.ac.id)  
Debby Christine Rende  
[debbyrende01@gmail.com](mailto:debbyrende01@gmail.com)  
Eunike Sintikhe Pelleng  
[widyeunike@gmail.com](mailto:widyeunike@gmail.com)  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Indonesia

## ABSTRAK

Pasca berakhirnya otoritarianisme Orde Baru, Indonesia mengalami pergeseran politik ke arah demokratis berkat artikulasi perlawanan politik dari ragam kekuatan penentang Orde Baru. Salah satu hasil dari proses demokratisasi pasca-Orde Baru ini adalah desentralisasi. Bagi para teknokrat neo-institusionalis yang berafiliasi dengan lembaga-lembaga pembangunan dunia, desentralisasi diyakini dapat membuka ruang demokrasi lokal yang luas, memberikan kesempatan partisipasi politik masyarakat sipil lokal, dan menjadikan pemerintahan lokal berbasis pada prinsip-prinsip *good governance*. Mereka mengaggap, apabila tatanan ini diatur secara teknokratis, demokrasi tingkat lokal akan berjalan dengan baik. Akan tetapi, berjalannya sebuah tatanan yang demikian sangat dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh dinamika kekuasaan lokal yang sifatnya sangat politis, alih-alih teknokratis.

Penelitian ini membahas bagaimana dinamika kekuasaan lokal saling beresonansi secara negatif dengan kekuatan masyarakat sipil lokal, yaitu YLBHI-LBH Manado. Proses-proses politik seperti kontrol sumber daya dan mempertahankan kepentingan dari kekuasaan lokal menjadi kondisi yang harus dihadapi oleh YLBHI-LBH Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana sumber-sumber data didapat dari proses wawancara dan berbagai sumber literatur tertulis. Penelitian ini berkesimpulan bahwa peranan YLBHI-LBH Manado, baik secara struktural maupun institusional, belum mampu menjadi penanding bagi kekuasaan lokal. Formasi kekuasaan politik dominan di Sulawesi Utara tetap kokoh, sementara artikulasi politik demokratis YLBHI-LBH Manado tetap marginal. Upaya mereorganisasi kekuatan dengan menginklusikan kelompok-kelompok masyarakat sipil lokal seperti mahasiswa ke dalam jejaring gerakan, pada faktanya mengandung kelemahan-kelemahan tertentu. Dalam kondisi yang demikian, YLBHI-LBH Manado beserta jejaring gerakannya tidak dapat menjadi kekuatan yang signifikan.

**Kata Kunci:** *Kekuasaan Lokal; Masyarakat Sipil; Desentralisasi*

## PENDAHULUAN

Keruntuhan tatanan otoritarianisme Orde Baru telah membuka peluang bagi Indonesia untuk menginstitutionalisasi ragam proyek demokrasi. Salah satunya adalah desentralisasi yang diyakini dapat memberikan kemajuan dalam proses demokrasi lokal, seperti adanya akuntabilitas, transparansi, partisipasi, atau apa yang lebih akrab disebut sebagai *good governance*. Proyek desentralisasi di Indonesia diinjeksi oleh teknokrat-teknopol lokal ataupun internasional yang kebanyakan dipengaruhi oleh ide-ide neoinstitutionalisme yang dipromosikan oleh lembaga-lembaga pembangunan internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), Asia Development Bank, Ford Foundation, United State Agency for International Development (USAID), dll. Teknokrat-teknokrat di lembaga ini berupaya mempersiapkan kerangka acuan yang bernuansa desentralistik untuk diterapkan oleh pemerintahan Indonesia pasca

otoritarianisme Orde Baru (lihat misalnya, World Bank, 1999; World Bank 1983). Senada dengan itu, para sarjana yang berperspektif neoinstitutionalisme melihat proyek desentralisasi dan *good governance* akan membawa perubahan dalam pemerintahan dan proses politik demokrasi di aras lokal (Rasyid, 2003; Pratikno, 2005; Antlov, 2003).

Hasil analisis yang bernuansa positif dalam mengobservasi demokratisasi di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional dan para sarjana institutionalis ini pada dasarnya mengabaikan dinamika struktur kekuasaan dalam proses analisisnya. Faktanya, demokratisasi dan desentralisasi tidak berhasil mengubah relasi kekuasaan yang bersifat predatorial (Hadiz, 2003; Robison & Hadiz, 2004; Hadiz, 2010; Hadiz & Robison; 2014; Pribadi, 2018; Mudhoffir; 2021). Aliansi predatorial bisnis-politik dan birokrat menggunakan demokrasi dan desentralisasi untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan dalam format

politik yang telah berubah. Kekuatan-kekuatan dominan warisan otoritarianisme berhasil menyesuaikan dirinya, membajak dan menggunakan institusi demokrasi sebagai instrumen untuk akumulasi privat (Robison & Hadiz, 2004; Hadiz, 2010). Alih-alih mengikuti format teknokratik seperti *good governance*, para elite dominan baik nasional dan lokal justru tetap mempertahankan relasi kekuasaan predatorial sembari mengabaikan format tersebut. Dengan demikian, perubahan institusional yang ditandai oleh institusionalisasi proyek demokrasi seperti desentralisasi, pada faktanya tidak dapat merubah struktur kekuasaan di Indonesia secara signifikan.

Sementara itu, masyarakat sipil yang diharapkan dapat membawa perubahan sosial secara mendasar tetap berada dalam pinggiran arena politik. Strategi *go-politics* (mengintervensi sistem politik dengan masuk kedalam sistem politik formal) yang dilakukan oleh para aktivis pro-demokrasi pada awal reformasi tidak mampu

melakukan perbaikan yang signifikan. Sebaliknya, mereka telah menjadi bagian dari kekuatan politik predatorial. Represi dan depolitisasi terhadap masyarakat sipil selama Orde Baru sangat berpengaruh untuk meniadakan kekuatan politik masyarakat sipil untuk mengartikulasikan kepentingan demokratis dan keadilan sosial.

Sementara itu, kelas menengah reformis yang berhaluan liberal serta kekuatan politik kiri tetap lemah, merupakan hasil dari dominasi kapitalisme predatoris (Mudhoffir, 2022). Analisis yang menggunakan perspektif Tocquevillian melihat masyarakat sipil adalah basis fundamental untuk melakukan perubahan ke arah demokrasi. Akan tetapi perspektif ini gagal melihat pengaruh kekuatan dominan dalam masyarakat sipil yang menjadi penghambat bagi artikulasi politik mereka. Alih-alih menganalisis masyarakat secara kritis, perspektif ini justru membentuk pandangan populistik terhadap masyarakat sipil. Hal itu karena keterbatasan dalam

perspektif masyarakat sipil Tocquevillian itu sendiri yang hanya melihat masyarakat sipil sebagai asosiasi otonom dan volunteristik, dan mengabaikan faktor pertarungan kekuasaan yang eksis. Mengikuti perspektif masyarakat sipil Gramscian, masyarakat sipil justru adalah arena pertarungan dari berbagai kekuatan yang saling bertarung dan mendominasi dan tidak independen dari faktor ekonomi, negara, dan kekuatan sosial lainnya (Fonseca, 2016: 94).

Masyarakat sipil sebagai arena pertarungan dari ragam kekuatan sosial inilah yang termanifestasi dalam dinamika kekuasaan lokal di Sulawesi Utara. Dalam konteks ini, desentralisasi tidak berhasil memproduksi masyarakat sipil lokal yang kuat. Tidak seperti pandangan populisme lokal yang melihat desentralisasi akan membuka peluang agensi bagi masyarakat sipil, kondisi masyarakat sipil Sulawesi Utara justru harus menghadapi tantangan dari kekuatan politik lokal dominan yang berupaya mempertahankan relasi dan

kepentingan predatorialnya. Dengan menempatkan pengalaman Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum Manado (YLBHI-LBH Manado) sebagai suatu studi kasus, penelitian ini berargumen bahwa kekuatan masyarakat sipil Sulawesi Utara (YLBHI-LBH Manado dan jejaring gerakannya) tidak menjadi kekuatan tandingan yang signifikan ketika harus berhadapan dengan kekuasaan lokal predatorial. Desentralisasi yang diharapkan dapat membuka peluang masyarakat sipil lokal untuk mengartikulasikan kepentingan kerakyatannya, justru menjadi instrumen yang memungkinkan kekuatan politik lokal dominan untuk melakukan proses eksklusif dan marginalisasi terhadap masyarakat marginal serta aspirasi politik mereka tentang keadilan sosial. Alih-alih membangun relasi harmonis dan koeksistensi antara negara, pasar dan Masyarakat sipil—sebagaimana kepercayaan kelompok neoinstitusionalis—penelitian ini justru

menunjukkan bahwa hubungan yang terbangun justru hubungan yang konfliktual akibat ragam kontradiksi kepentingan dengan kekuasaan lokal predatorial. Penelitian ini mencoba menjawab, dalam dinamika kekuasaan di aras lokal tersebut, bagaimana YLBHI-LBH Manado mengartikulasikan perannya, baik secara struktural dan institusional? Lalu melalui cara seperti apa YLBHI-LBH Manado dalam menghadapi kekuasaan lokal tersebut?

## TINJAUAN PUSTAKA

### a. Politik Desentralisasi

Terdapat dua pendekatan dalam memahami desentralisasi. *Pertama* pendekatan yang dibangun secara teknokratik oleh para teknokrat-teknokrat lembaga pembangunan dunia, atau apa yang disebut sebagai neoinstitusionalisme. *Kedua* adalah pendekatan strukturalis yang secara kritis mengamati desentralisasi dalam kaitannya dengan pertarungan

kekuasaan dan struktur ekonomi-politik. Pendekatan pertama berupaya menginstitusionalisasi *good governance* skala lokal, sedangkan kedua membongkar relasi kekuasaan dibalik proyek itu. Menurut Vedi R. Hadiz (2004), neoinstitusionalisme dapat didefinisikan ‘sebagai sebuah aliran pemikiran pembangunan yang bermaksud menjelaskan sejarah, keberadaan, dan fungsi dari berbagai macam institusi (pemerintah, hukum, pasar, keluarga dan sebagainya) berdasarkan asumsi-asumsi teori ekonomi neoliberal’. Menurutnya, neoinstitusionalisme merupakan varian dari ortodoksi neoliberal yang begitu berpengaruh dalam berbagai pemerintahan, badan pembangunan internasional, para penentu kebijakan, dan sebagian besar komunitas ilmuwan sosial’. Pemahaman yang demikianlah yang menjadi paradigma berpikir lembaga-lembaga pembagungan internasional seperti World Bank dan IMF untuk merumuskan program-program pembangunan skala global, terutama

dibelahan Bumi Selatan. Sebagaimana World Bank memahami desentralisasi:

Decentralization can be defined as the transfer of responsibility for planning, management and resource raising and allocation from the central government and its agencies to: (a) field units of central government ministries or agencies, (b) subordinate units or levels of government, (c) semiautonomous public authorities or corporations, (d) areawide, regional or functional authorities, or (e) nongovernmental private or voluntary organizations (World Bank, 1983: 13).

Dalam pengertian yang demikian, desentralisasi yang dipahami World Bank semata-mata adalah persoalan managerial untuk perencanaan, tata kelola institusi, serta alokasi sumber daya. World Bank hanya menaruh atensi terhadap bagaimana desentralisasi diwujudkan dengan cara-cara teknokratik, oleh para teknokrat dan

teknopol, tanpa mengakui dinamika kekuasaan, seperti dominasi, kontrol, dan koersi sebagai realisme politik yang eksis dalam berbagai konteks, khususnya di negara Dunia Ketiga. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa kalangan neoinstitusionalis tidak membutuhkan politik dalam mewujudkan program desentralisasi. Seperti yang ditunjukkan Hadiz, bahwa politik dilibatkan hanya sebagai penyedia rangsangan awal ke arah desentralisasi, dan setelah tahap itu dilampaui, ia justru menjadi gangguan bagi pertimbangan teknokratik saat pilihan-pilihan kebijakan dilakukan (Hadiz, 2004). Singkatnya, mereka akan mendomplengi politik sejauh programnya diterapkan.

Sejauh ini World Bank mengajukan beberapa tipe desentralisasi yang mereka pahami sebagai ‘transfer otoritas dan tanggung jawab atas fungsi publik ke masing-masing pemerintahan daerah’ (World Bank, 1999: 2) yakni: desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, dan desentralisasi

ekonomi atau pasar. Desentralisasi politik menurut mereka yaitu memberikan kekuasaan lebih kepada warga negara dan perwakilan terpilih dalam pengambilan keputusan publik. Sedangkan desentralisasi administratif berusaha mendistribusikan wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan untuk menyediakan layanan diantara berbagai tingkat pemerintahan. Desentralisasi fiskal memberikan otoritas lebih kepada pemerintahan lokal untuk membuat berbagai keputusan dalam masalah finansial, meliputi pendapatan, alokasi, ataupun transfer dari pusat. Yang terakhir, yaitu desentralisasi ekonomi dan pasar bermaksud untuk mengadopsi mantra neoliberal seperti privatisasi dan deregulasi sebagai bentuk perhatian terhadap bisnis.

Observasi yang dilakukan Hadiz menunjukkan bahwa tipe-tipe desentralisasi yang demikian adalah seperangkat pilihan kebijakan yang bermaksud menyediakan jalan bagi operasionalisasi pasar ditingkat lokal. Menurutnya, neoinstitusionalisme serta

variannya—seperti desentralisasi—bukan sekedar ikhtiar akademik dari para intelektual pendukungnya, tetapi merupakan bagian dari pengaruh dan secara politis merupakan proyek neoliberal yang berupaya menyusun kembali kekuatan negara untuk memfasilitasi pasar (Hadiz, 2010: 26).

Posisi teoritis yang diambil dalam penelitian ini adalah memahami desentralisasi bukan sebagai proyek yang bernuansa teknokratik *an sich*, tetapi bagaimana desentralisasi dipahami dalam kaitannya dengan dinamika kekuasaan yang pada taraf tertentu mendefinisikan bentuk representatif dari desentralisasi itu sendiri. Politik desentralisasi yang dimaksud—sebagaimana observasi Hadiz terhadap kekuasaan dan politik di Sumatra Utara—adalah bahwa kebijakan desentralisasi dibentuk bukan berdasarkan perhitungan yang bersifat teknokratik, melainkan sebagai suatu persoalan perjuangan konkret memperebutkan kekuasaan dan sumber daya diantara

kepentingan-kepentingan yang berbeda ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten (Hadiz, 2003: 124). Dalam sudut pandang yang demikian inilah pemahaman atas desentralisasi itu dibentuk: bahwa kebijakan desentralisasi bukanlah persoalan bagaimana memilih ‘secara rasional’ keputusan-keputusan yang ‘tepat’ dalam suatu cara teknokratik dan bebas nilai, melainkan secara fundamental, lebih dibentuk oleh pertarungan diantara berbagai kepentingan yang bersaing (Hadiz, 2004).

#### **b. Masyarakat Sipil**

Perspektif dominan dalam memahami masyarakat sipil cenderung melihatnya sebagai asosiasi otonom dan volunteristik. Perspektif tersebut bersumber dari pemahaman Alexis de’Tocqueville yang berupaya memahami konstruksi demokrasi di Amerika. Seperti yang dikutip Hikam (1996: 3), bahwa masyarakat sipil menurut Tocqueville didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain

kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Pengertian tersebut dapat mewujudkan dalam berbagai organisasi dan asosiasi yang dibangun secara bebas tanpa pengaruh kekuasaan negara (Hikam, 1996: 3).

Kontras dengan perspektif di atas, masyarakat sipil Gramscian justru berpemahaman secara kebalikan. Masyarakat sipil Gramscian menurut Fonseca (2016: 94) adalah sebagai arena pertarungan dari berbagai kekuatan yang saling bertarung dan mendominasi, yang tidak independen dari faktor ekonomi, negara, dan kekuatan lainnya. Antonio Gramsci (1983 [2013]) memahami masyarakat sipil sebagai arena pertarungan hegemoni dari berbagai kekuatan-kekuatan sosial yang bertarung. Gramsci mendudukan hegemoni sebagai konsepsi sentral untuk memahami pertarungan

tersebut. Menurutnya, hegemoni dibangun berkat adanya kepemimpinan moral dan intelektual yang dapat memengaruhi serta memobilisasi persetujuan (*consent*) secara spontan dari kekuatan-kekuatan sosial marginal kepada kekuatan sosial dominan. Seperti apa yang ia katakan dalam *Prinsons Notebooks*:

Persetujuan “spontan” yang diberikan oleh sejumlah besar massa...secara historis disebabkan oleh prestise (dan kepercayaan) yang dinikmati oleh kelompok dominan karena posisi dan fungsi mereka dalam dunia produksi (Gramsci, 1983 [2013]: 17).

Penggunaan *consent* sebagai konstruksi kekuasaan yang hegemonik bukan berarti meninggalkan cara-cara koersif agar kekuasaan dominan dapat tetap berkuasa. Menurut Gramsci, sekalipun kekuasaan dominan secara hegemonik telah menjalankan kepemimpinan moral dan intelektual, serta berhasil memobilisasi *consent*, cara-cara koersi (*coercion*) untuk

berkuasa tetap harus dijalankan untuk mendisiplinkan kelompok-kelompok yang belum “setuju” atau mereka yang berada di luar jangkuan *consent* (Gramsci, 1983 [2013]: 81-82). Sederhananya, kekuasaan dominan adalah *consent* yang didukung dan diperkuat oleh koersi (Imam, 2010: 176).

Arena masyarakat sipil dalam perspektif Gramsci merupakan *locus* bagi pertarungan politik dan pergulatan sosio-ekonomis. Kekuatan dominan yang mengartikulasikan kekuasaannya dalam arena masyarakat sipil, entah dengan *consent* atau *coercion*, bertujuan untuk membangun kepentingan, nilai, serta norma yang diterima dan terinternalisasi oleh kekuatan sosial lain. Pada titik inilah kelompok dominan tersebut menjadi hegemonik. Hal tersebut dijalankan dengan strategi “perang posisi” (*war of position*) dengan membiarkan nilai-nilai dan norma sebagai produk kekuasaan dominan tersebut menjadi dapat diterima oleh kekuatan sosial yang marginal. Dalam pemahaman Gramsci, masyarakat sipil

merupakan bagian dari superstruktur (termasuk masyarakat politik) yang memiliki agensi, yaitu memunculkan transformasi sosial dan ekonomi politik, terutama dimotori oleh apa yang Gramsci sebut sebagai intelektual organik: yakni mereka yang dapat berperan sebagai penggerak, konstruktor, dan organisator yang muncul dari dalam kelompok sosial itu sendiri (Gramsci, 1983 [2013]: 10). Setiap kelompok sosial menurutnya mempunyai kaum intelektualnya masing-masing yang berupaya mewakili kepentingan kelompok sosial tersebut. Hal ini termanifestasi misalnya dalam serikat buruh, dimana seorang buruh dalam serikat sekaligus menjadi organisator kekuatan buruh dalam serikat yang membawa kepentingan-kepentingan kelompok buruh.

Kelit-kelindan antara kekuasaan dominan di satu sisi dan masyarakat sipil di sisi yang lain dalam pengertian masyarakat sipil Gramscian inilah yang tidak diperhatikan oleh teknokrat-teknopol lembaga-lembaga pembangunan dunia

internasional. Dalam nuansa yang apolitis, World Bank memahami masyarakat sipil sebagai:

Ruang di antara keluarga, pasar dan negara; yang terdiri dari organisasi-organisasi nirlaba dan kelompok-kelompok kepentingan khusus, baik resmi maupun tidak resmi, yang bekerja untuk memperbaiki kehidupan para konstituennya (World Bank, 2010 dalam Hadiz, 2004).

Hal ini termasuk organisasi non-pemerintah dan organisasi nirlaba yang hadir dalam kehidupan publik, mengekspresikan kepentingan dan nilai-nilai anggotanya dan berdasarkan etika, budaya, politik, ilmiah, atau berdasarkan pertimbangan agama maupun filantropi (*worldbank.org*).

Versi neo-institusionalisme dalam pengertian masyarakat sipil ini mengandaikan bahwa masyarakat sipil yang bergairah dapat berperan penting

untuk mendorong demokratisasi, desentralisasi, maupun *good governance* serta membuka ruang akan partisipasi publik dalam agenda-agenda pembangunan. Pengertian masyarakat sipil versi neo-institusionalisme ini mendasarkan diri pada modal sosial, yaitu norma-norma informal yang mendorong terjadinya kerja sama antara dua atau lebih individu (Fukuyama: 1999). Seperti yang dinyatakan Hadiz, modal sosial pada awalnya kritik terhadap ketidaksetaraan kelas dalam kapitalisme kontemporer seperti yang dilakukan Bourdieu (1986), namun pada akhirnya diambil alih oleh para pengikut teoritis konservatif seperti Putnam (1993, 2000), Coleman (1994) dan Becker (1996) (lihat Hadiz, 2004). Kelompok masyarakat sipil yang mendukung versi neoinstitusionalis ini ditingkat lokal kemudian disebut Hadiz (2010) sebagai populisme masyarakat sipil. Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa desentralisasi akan membuka peluang bagi keterlibatan masyarakat sipil secara

bermakna dan bebas dari kekuasaan lokal yang predatorial.

### c. Kekuasaan Oligarki Lokal

Desentralisasi telah mendorong kekuasaan terlokalisasi. Proses lokalisasi kekuasaan turut menguatkan posisi penguasa lokal, yaitu suatu aliansi politik-bisnis dan birokrat. Kesempatan ini mereka gunakan untuk tujuan akumulasi privat dengan membangun hubungan predatoris. Studi-studi politik lokal lalu menamai kekuatan ini sebagai *local bossism*, *local strongman*, atau oligarki lokal (Sidel, 1999; 2005; Migdal, 2004, Hadiz, 2010). Walaupun terdapat ragam penyebutan dalam diskursus akademik, corak umum dari kekuatan ini adalah reorganisasi kekuasaan politik yang predatoris. Dalam penelitian ini, corak kekuasaan lokal yang demikian disebut sebagai oligarki lokal. Sebagaimana ditekankan oleh Hadiz & Robison (2014), kekuatan ini lahir seiring dengan pembangunan negara kapitalis yang

dimulai sejak otoritarianisme pembangunan Soeharto:

The rise of oligarchy in Indonesia at a time of growth and expansion of market capitalism during the New Order is seen as the product of struggles over the accumulation of private and corporate wealth and the way control of public institutions and state authority became essential to this process (Hadiz & Robison, 2014: 38).

Kekuatan ini lahir dari suatu proses pertarungan untuk mengukuhkan kekuatan kelompok dominan agar proses akumulasi privat dapat dilakukan dengan mengontrol institusi penting negara, dan jejaring predatorial patronistik pada sisi yang lain. Menurut Hadiz & Robison (2004), oligarki adalah “sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya” (Hadiz & Robison, 2014: 37). Koalisi ini mampu membangun kekuasaan di dalam

perekonomian kapitalis yang sedang berekspansi melalui *oil boom* dekade 80-an yang berlimpah, dan suatu hubungan sangat terstruktur dengan para investor dan pemberi pinjaman internasional” (Hadiz & Robison, 2005). Relasi predatorial semacam ini terjadi berkat adanya fusi antara otoritas politik dan kekuasaan ekonomi yang telah menjadi karakter umum pada awal pembangunan kapitalis. Relasi predatorial semacam ini yang telah terbangun sejak kejayaan Orde Baru tetap berlanjut dengan hanya menyesuaikan pola meraih kekuasaan dalam kondisi politik Indonesia yang baru. Dengan mempertahankan relasi oligarkis yang predatorial antara aliansi politisi-birokrat dan pengusaha, aliansi ini bermaksud untuk mengakumulasi serta mempertahankan kapital dan kekuasaan. Politisi-birokrat memiliki sumber daya yang terbatas sehingga memerlukan akses kepada para pengusaha. Begitupun pengusaha yang memiliki keterbatasan otoritas sehingga memerlukan politisi-birokrat agar proses

akumulasinya terjaga. Dengan kata lain, Hadiz dan Robison sebetulnya ingin menegaskan kembali kritik kapitalisme Marx. Kritik oligarki dengan kata lain merupakan suatu bentuk kritik atas formasi sosial tertentu dalam kapitalisme (Mudhoffir, 2020: 30). Pertarungan untuk saling merebut kontrol atas berbagai sumber daya material tetap eksis bahkan dalam perubahan secara institusional, misalnya seperti demokrasi, desentralisasi, *good governance*, dan seterusnya. Secara eksplisit disebutkan bahwa:

the politics of institutional change and markets must be seen in the context of such ‘wrenching social struggles’ between shifting coalitions of state power and social interest assembled around four main socio-political agendas (Robison & Hadiz, 2004: 5).

Dengan demikian, proyek teknokratik seperti desentralisasi dan *good governance* skala lokal tidak dapat menjadi

suatu jaminan berakhirnya relasi kekuasaan predatoris dan hasrat akumulasi privat yang mengorbankan sumber daya lokal. Kekuatan oligarki yang terinkubasi sejak era otoritarianisme Orde Baru tetap bertahan dalam suatu proses desentralisasi kekuasaan di wilayah lokal. Lokalisasi kekuasaan inilah yang mendorong pembentukan kekuasaan oligarki lokal dan kepentingan predatorialnya untuk membajak dan menguasai sumber daya lokal.

#### **d. Kekuasaan Lokal dan Kepentingan di Sulawesi Utara**

Bagian ini akan mendasarkan pada analisis makro-politik lokal Sulawesi Utara, diantaranya adalah memahami formasi kekuasaan lokal Sulawesi Utara kontemporer serta kelit-kelindannya dengan kepentingan. Dalam diskursus akademik, formasi kekuasaan lokal Sulawesi Utara dilihat sebagai suatu konfigurasi kekuasaan yang berbasis pada formasi klan. Dalam analisisnya, Wasisto

R. Djati (2013) melihat bahwa politik lokal di Sulawesi Utara lebih ditentukan oleh kekuatan klan politik keluarga yang sifatnya saling menakulukkan antar klan. Ia kemudian mengkategorikan politik lokal Sulawesi Utara ini sebagai bentuk *tribalism dynasties* yang beresonansi dengan ikatan klan politik, selain reproduksi ritus budaya etnis, ikatan primordial, ataupun stratifikasi sosial (Djati: 2013). Akan tetapi, analisis Djati ini masih terbatas pada kejayaan klan-klan politik masa lalu seperti Sondakh, Sarundajang, dan Mangindaan/Runtu, yang pada perkembangan terkini politik lokal di Sulawesi Utara sudah tidak mempunyai pengaruh yang besar. Hari ini, pergeseran politik klan berpindah kepada suatu klan, yaitu Dondokambey, yang direpresentasikan oleh Olly Dondokambey sebagai patron utama, yang memanfaatkan posisi strategis ganda (*double position strategy*), yaitu sebagai elite partai dan kepala daerah untuk membentuk kekuasaan oligarki lokal.

Jaringan aliansi politik keluarga di Sulawesi Utara terkonsentrasi pada kekuasaan lokal dominan, yaitu Olly Dondokambey sebagai Gubernur *cum* elite partai PDI-P. Penyebaran jaringan aliansi politik keluarga tersebut menempati posisi-posisi strategis, seperti kepala daerah, pimpinan DPRD, struktur birokrasi, serta berbagai organisasi korporatis.

Robby Dondokambey, yang merupakan kakak kandung dari Gubernur Olly Dondokambey, memenangi Pilkada pada 2020 di kabupaten Minahasa dengan menjadi Wakil Bupati dari Royke Roring yang didukung oleh mesin partai PDI-P. Sedangkan ipar sang Gubernur, yaitu Rinny Tamuntuan, yang sebelumnya adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi dilantik sebagai Pelaksana Jabatan Sementara (PJS) Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pengangkatan Rinny Tamuntuan ini diakibatkan oleh perubahan waktu dalam pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh KPU-RI untuk dilaksanakan serentak, baik itu pemilihan Presiden, anggota legislatif,

dan kepala daerah kabupaten/kota pada 4 Februari 2024 nanti. Istri dari Rinny Tamuntuan, yaitu Fransiscus Andi Silangen merupakan ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari fraksi PDIP. Keterkaitan posisi keluarga dalam institusi pemerintahan tidak berhenti di sini. Misalnya saja kakak kandung dari sang gubernur, yaitu Altje Dondokambey, juga menempati posisi strategis dengan menjadi ketua DPRD kota Manado. Altje Dondokambey berkontestasi dalam pemilihan legislatif kota Manado melalui PDI-P. Terdapat juga nama-nama seperti Adriana Dondokambey sebagai kakak dari gubernur yang menjadi anggota DPR-RI dengan PDI-P sebagai kendaraan politiknya. Sedangkan anak Adrian, yaitu Kevin Lotulong, saat ini adalah wakil bupati Minahasa Utara dari partai PDI-P. Di sini, PDI-P menjadi kendaraan dominan bagi jaringan aliansi politik keluarga Gubernur dalam pertarungan elektoral di daerah. Seperti dikatakan sebelumnya, Olly Dondokambey yang merupakan elite partai menggunakan otoritas serta kontrol partai

di daerah untuk mengakomodir kekuatan politik yang didasarkan pada hubungan dekat keluarga. Terkonsentrasinya otoritas partai pada sosok personal elite partai membuat partai itu sendiri tidak dapat menjalankan demokratisasi internal yang akan berujung pada pelemahan partai itu sendiri, serta melahirkan bentuk kompetisi elektoral yang kian terpersonalisasi (Mietzner: 2021).

Anggota keluarga lain, yaitu Rio Dondokambey sebagai anak dari Gubernur Olly Dondokambey saat ini memegang beberapa organisasi korporatis sebagai sumber daya politik untuk bertarung dalam kompetisi elektoral selanjutnya. Rio Dondokambey saat ini menjadi pimpinan dalam berbagai organisasi, salah satunya adalah sayap partai PDI-P, yaitu Banteng Muda Indonesia (BMI) sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah BMI Sulawesi Utara (Manadopost.com: 2022). Selain menjadi ketua BMI Sulawesi Utara, Rio Dondokambey juga merupakan ketua Dewan Pimpinan Daerah dari sebuah

organisasi korporatis bentukan rezim otoritarian Orde Baru, yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Pada 2020, ia juga dilantik sebagai ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Sulawesi Utara (Manado.tribunnews.com: 2020) yang merupakan organisasi berbasis pebisnis sebagai kekuatan untuk mendorong keberpihakan terhadap kelompok bisnis. Proses penyebaran kuasa dan kepentingan kekuasaan lokal dominan juga terjadi dalam institusi religius seperti gereja dengan dipilihnya Rio Dondokambey sebagai ketua Pemuda Sinode Gereja Masehi Injil di Minahasa (GMIM) pada Sidang Sinode GMIM 2022 (manadoterkini.com: 2022).

Formasi kekuasaan lokal yang menurut Djati (2013) berbasis pada klan, nyatanya membentuk suatu relasi yang melampaui hal tersebut. Di Sulawesi Utara, fenomena jaringan aliansi politik keluarga ini lebih merupakan kecenderungan dari sebuah formasi kekuasaan yang oligarkis. Baik aktor ataupun instrumen

kekuasaannya, seperti jabatan atau partai politik yang berdasarkan hubungan keluarga, digunakan untuk melancarkan kontrol atas pemerintahan serta ragam sumber daya material lokal, yang pada akhirnya membentuk formasi kekuasaan oligarki (Hadiz & Robison: 2014). Penyebaran kekuasaan ini melalui dua sumber, yaitu hasil kemenangan kompetisi elektoral yang memanfaatkan posisi strategis Olly Dondokambey yang memasukan keluarga dekatnya dalam jaringan partai, sehingga membentuk jaringan aliansi politik keluarga dalam partai dan institusi pemerintahan. Posisi kekuasaan berdasarkan keluarga di dalam partai dan pemerintahan juga digunakan untuk pengkooptasian berbagai organisasi korporatis sebagai upaya memperkokoh posisi politik dan kontrol terhadap organisasi masyarakat. Singkatnya, formasi kekuasaan yang spesifik ini dapat dipahami sebagai pra-kondisi untuk meperkokoh kekuatan politik untuk menanamkan ragam

kepentingan predatorial dan pembangunan jaringan kekuasaan oligarki.

Reorganisasi kekuasaan lokal predatoris yang telah terbangun pada akhirnya digunakan untuk mengokohkan ragam kepentingan predatoris. Misalnya adalah peran pemerintah provinsi melalui Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu yang mengeluarkan izin lingkungan bernomor 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 kepada PT. Tambang Mas Sangihe (PT. TMS) untuk beroperasi. PT. TMS adalah perusahaan ekstraktif pertambangan, di mana 70 persen sahamnya dikuasai oleh *Baru Gold Corporation*, korporasi tambang asal Kanada, yang dikepalai oleh Terry Filbert sebagai direktur utamanya. PT. TMS adalah salah satu perusahaan yang mendapatkan keistimewaan pada masa otoritarianisme pembangunan rezim Orde Baru Soeharto, di mana korporasi tambang tersebut mendapatkan Kontrak Karya (seperti Freeport)—sebuah perjanjian bisnis istimewa yang diberikan langsung oleh Presiden (Soeharto) kepada

korporasi—untuk sebuah ambisi bisnis bernama “*Sangihe Project*”. Proyek tambang mas ini tertuang dalam laporan *East Asia Mineral Corporation dan Mining Associates* (2017) di mana luas wilayah dalam Kontrak Karya tersebut sebesar 42 ribu hektar yang mencakup setengah dari luas pulau Sangihe. Dalam merespon hal ini, Gubernur Olly Dondokambey tidak memiliki kejelasan sikap dan mengaggap ini adalah tanggungjawab pemerintah pusat, padahal ia sendiri telah member izin ekspansi kapital skala global ini berlangsung (Manadopost.id: 2021)

Kasus lain yang juga memperlihatkan berbagai kepentingan kekuatan dominan diantaranya ekspansi perkebunan sawit oleh PT. Asiatik di Kabupaten Bolaang Mongondow, yang justru kehadirannya dijustifikasi oleh pemerintah daerah. Selain itu, keterlibatan militer seperti kasus perampasan lahan di perkebunan Kelelondey turut menguatkan bahwa lokalisasi kekuasaan melalui proses desentralisasi tidak menjamin hilang

kepentingan predatoris untuk membajak sumber daya lokal. Hal itu hadir dalam sebuah trajektori politik lokal yang spesifik, yaitu globalisasi ekonomi neoliberal di satu sisi, dan lokalisasi kekuasaan di sisi yang lain, dan pada akhirnya membentuk corak baru politik lokal (Harris, dkk. 2005: 2). Proses glokalisasi ini lah yang menjadi faktor determinan terhadap artikulasi kekuatan sosial penentang, seperti bagaimana kepentingan-kepentingan sosial-demokrasi diperjuangkan.

Kepentingan sosial-demokrasi sebagaimana yang dimaksud adalah serangkaian artikulasi politik demokrasi yang berbasis pada keadilan sosial dan kesetaraan warga negara. Artikulasi macam inipula yang diperjuangkan YLBHI-LBH Manado sebagai kelompok sosial penentang. Kepentingan dan gerakan sosial-demokrasi, dalam konteks pertarungan kepentingan di Sulawesi Utara, dibawa oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil melalui perjuangan atas akses sosial-ekonomi kelompok marginal,

seperti hak petani atas lahan produksi. Beragam kelompok tersebut terintegrasi pada agenda-agenda perjuangan yang dilakukan oleh YLBHI-LBH Manado. Dalam hal ini, YLBHI-LBH Manado memiliki peran untuk mereorganisasi kekuatan masyarakat sipil untuk terlibat pada gerakan perjuangan kepentingan sosial-demokrasi. Walaupun pada faktanya gerakan yang telah mereka bangun tidak menjadi kekuatan yang signifikan.

#### **e. Dinamika Kekuasaan Lokal dan Signifikansi Peran YLBHI-LBH Manado**

Bagian ini akan menganalisis mikro-politik lokal di Sulawesi Utara untuk melihat bagaimana dinamika kekuasaan skala lokal beroperasi dalam arena pertarungan antar kelompok sosial, dengan menjadikan kasus konflik agraria di desa Kalasey Dua sebagai analisisnya, dan bagaimana ragam kelompok masyarakat sipil, terutama YLBHI-LBH Manado memainkan peranannya. Penelitian ini

membagi dua kategori peran YLBHI-LBH Manado, yaitu peran struktural (*structural role*) dan peran institusional (*institutional role*). Peran struktural berkaitan dengan upaya emansipasi masyarakat marginal untuk membuat relasi kuasa yang timpang menjadi relatif setara dengan cara-cara pengorganisasian melalui organisasi rakyat yang bertujuan untuk membangun kolektivitas, kesadaran, dan kemandirian gerakan masyarakat marginal menghadapi tekanan dan ancaman kekuatan dominan. Sedangkan peran institusional adalah proses mobilisasi kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi masyarakat marginal pengetahuan serta akses bantuan hukum gratis untuk menghadapi manipulasi dan subordinasi hukum.

Konflik agrarian di Desa Kalasey Dua sudah menyejarah sedemikian rupa. Wilayah yang dulunya adalah bekas HGU PT. Asiatik, saat ini adalah pemukiman warga sekaligus lahan garapan para petani. Sejak 1980-an para petani penggarap sudah terlibat dalam proses perjuangan untuk

mempertahankan akses mereka atas lahan produksi. Ancaman perampasan ini secara dominan datang dari aktor-aktor negara yang berkepentingan untuk melaksanakan berbagai proyek pembangunan, terutama infrastruktur. Kalasey Dua, sebagaimana pedesaan di Indonesia pada umumnya, terbagi antara wilayah pemukiman dan wilayah pertanian tradisional. Kedudukan warga Kalasey Dua, yang secara historis adalah eks buruh PT. Asiatik sejak 1930-an, diakui negara ketika bekas lahan HGU PT. Asiatik yang telah berakhir kemudian menjadi objek redistribusi lahan yang ditandai oleh keluarnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1986 bernomor 341/DIA/1986. Akibat dari kebijakan itu, warga desa Kalasey Dua resmi mendiami dan mengelola lahan untuk kebutuhan material mereka. Dalam wilayah garapan yang saat ini mayoritas ditanami komoditas pisang, adalah hasil produksi utama dan menempati posisi puncak dalam produksi komoditas pisang di Sulawesi Utara. Sayangnya, kedaulatan mereka

selama ini terancam oleh ragam kepentingan pembangunan negara. Sejak satu dekade yang lalu, wilayah garapan para petani telah menjadi objek distribusi lahan kepada berbagai institusi negara, tanpa sama sekali meminta persetujuan para petani, dan dilegitimasi dengan berbagai “keabsahan” hukum yang dimiliki oleh negara. Puluhan hektar lahan garapan ini telah dibagikan, mulai dari pembangunan Markas Komando Brimob, fasilitas Badan Keamanan Laut, Rumah Sakit, hingga yang terkini adalah untuk membangun Politeknik Negeri Pariwisata sebagai fasilitas pendukung industri Parawisata. Ini ditandai dengan adanya Surat Keputusan Gubernur bernomor 281/2021 yang menjadi dasar klaim hibah Pemerintah Provinsi kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Berkat Surat Keputusan “hibah” inilah perlawanan digencarkan oleh para petani dan berbagai kelompok masyarakat sipil lokal, dan dalam perkembangannya, keputusan hibah itu jugalah yang menjadi

objek gugatan hukum yang dilakukan oleh para petani.

Kasus Kalasey Dua telah memperlihatkan bagaimana pembangunan berjalan beriringan dengan peminggiran. Lahan produktif yang telah digarap dan menghasilkan kemakmuran, atas nama pembangunan dengan logika keuntungan, telah menutup akses ekonomi kelompok marginal seperti petani penggarap atas lahan garapan. Tercerabutnya petani penggarap dari lahan garapan ini merupakan salah satu bentuk kuasa eksklusif yang hadir dalam bentuk kekuatan pengaturan, pasar, pemaksaan, dan legitimasi (Hall, Hirsch, Li, 2020). Bentuk-bentuk kekuatan tersebut secara inheren telah hadir lewat proses-proses petanahan, misalnya alokasi tanah negara dan alih fungsi tanah. Dengan demikian, setiap proses-proses pertanahan seperti itu selalu memunculkan bentuk-bentuk eksklusi. Hal itu pula yang mendasari konflik sosial dan perlawanan terhadap ragam bentuk kuasa eksklusif tersebut.

Kondisi struktural tentang marginalisasi masyarakat oleh kekuatan dominan yang menanamkan kepentingan predatorialnya di desa Kalasey Dua menjadi hal yang melatarbelakangi keterlibatan YLBHI-LBH Manado untuk meleburkan kapasitas pengetahuan dan kekuatan bersama para petani. Peran struktural YLBHI-LBH Manado dapat dilihat dengan bagaimana lembaga ini berupaya mengatasi ketidaksetaraan kekuasaan yang ada. Dalam proses tersebut, bersama-sama dengan kekuatan organik para petani, mereka menjalankan proses pengorganisasian lewat berbagai cara yang tujuannya untuk mengatasi ketidaksetaraan kekuasaan yang dihadapi petani apabila harus berhadapan secara langsung dengan kekuasaan dominan.

Salah satu peran struktural YLBHI-LBH Manado adalah kontribusinya menghadirkan kesadaran politik. Mereka berperan untuk mentransformasikan penindasan struktural yang dialami menjadi kesadaran politik bersama. Walaupun

demikian, kesadaran politik ini tidak hadir hanya ketika YLBHI-LBH Manado mendampingi mereka. Kesadaran politik tersebut telah ada pada masyarakat, mengingat secara historis para petani Kalasey Dua telah terlibat dalam berbagai proses perlawanan sejak 1990-an. Pada tahun 1996-1997, para petani sudah terlibat dalam konflik agraria, di mana suku Bantik yang mayoritas mendiami wilayah pesisir pantai berupaya melakukan klaim atas wilayah desa dengan alasan wilayah tersebut adalah tanah adat. Di tahun 1997, kelompok Veteran Minahasa juga menginginkan lahan para petani untuk membangun perumahan. Selain itu, pada tahun 1998, para petani telah terlibat dalam aksi massa untuk menuntut lahan tersebut diberikan kepada petani (wawancara, Denny Tumey, Koordinator Solipetra: 01 September 2022). Aktivitas perlawanan mempertahankan kepentingan material para petani, dari fakta tersebut dapat dikatakan telah menyebar. Dengan demikian, YLBHI-LBH Manado hanya

berperan mengasah kembali kesadaran politik tersebut menjadi kesadaran bersama, terorganisir, dan mempunyai dampak untuk ketahanan kekuatan perjuangan para petani.

Selain itu, peran struktural YLBHI-LBH Manado juga dapat dipahami dengan melihat bagaimana mereka mendorong para petani untuk menjadi subjek yang aktif melalui organisasi rakyat. Proses ini juga menjadi faktor yang membuat kesadaran politik para petani terbangun. Para petani menuangkan kegeraman politis mereka dalam organisasi rakyat Solipetra. Solipetra didirikan pada tahun 2021 sebagai respon para petani terhadap perampasan lahan yang akan dilakukan oleh TNI AL. Dalam Solipetra, para petani berupaya membiasakan diri untuk menyelesaikan masalah secara kolektif dalam rapat-rapat umum. Mereka membuat keputusan-keputusan penting seperti perencanaan aksi, petugas penjagaan posko, bersih-bersih kebun secara kolektif, ibadah, dan kegiatan sosial lainnya. Solipetra juga menjadi kendaraan

penting bagi petani untuk proses artikulasi politik. Solipetra menjadi organisasi rakyat yang bertujuan untuk mentransformasikan kekuatan kolektif para petani menjadi kekuatan yang terorganisir. Kehadiran organisasi rakyat seperti Solipetra dibasis dampingan YLBHI-LBH Manado, juga merupakan tujuan dari proses pengorganisasian. Organisasi rakyat semacam ini, bagi YLBHI-LBH Manado adalah sarana untuk mematangkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui aktivitas yang terorganisir. YLBHI-LBH Manado dalam keputusan-keputusan internal selalu mempertimbangkan bahwa tujuan dari proses pengorganisasian masyarakat marginal adalah pemandirian gerakan melalui kehadiran organisasi rakyat yang darinya kemampuan agensi masyarakat dapat diartikulasikan. Menurut mereka, keberhasilan dari proses pengorganisasian adalah ketika masyarakat yang didampingi telah berhasil secara mandiri membangun gerakan (wawancara, Satryano Pangkey, YLBHI-LBH Manado:

05 Juni 2022). Solipetra dalam hal ini, berupaya diproyeksikan oleh YLBHI-LBH Manado menjadi organisasi rakyat yang mandiri yang tidak selalu menggantungkan berbagai macam penyelesaian masalah kepada mereka.

Peran struktural YLBHI-LBH yang lain adalah mengkoneksikan Solipetra dengan jaringan gerakan yang lain. Hal itu dapat dilihat dengan bergabungnya kelompok-kelompok mahasiswa seperti Cakrawala Mahasiswa Kerakyatan (CMK), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), aktivis Aksi Kamisan Manado, kelompok seniman, hingga aktivis lingkungan. Kelompok-kelompok mahasiswa adalah yang dominan sebagai bagian dari perjuangan petani Kalasey Dua. Kehadiran mereka membawa dinamika baru, selain diakui membantu perjuangan para petani (wawancara, Augustine Lombone, petani

Kalasey Dua: 27 Juni 2022), kehadiran mereka direspon oleh pemerintah sebagai bagian dari kekuatan yang memprovokasi petani. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan gubernur Olly Dondokambey dalam media, yang menyebut penolakan para petani atas hibah hanya dimotori oleh “orang luar” (KawanuaTV: 20 Februari 2022). Walaupun demikian, kelompok mahasiswa ini masih belum mampu untuk menjangkau lebih banyak lagi masyarakat di desa Kalasey Dua untuk terlibat dalam Solipetra.

Lewat peran struktural ini, kita dapat melihat bahwa YLBHI-LBH Manado berupaya membentuk gerakan yang solid dan terorganisir melalui peran aktif para petani dalam organisasi rakyat, dan bagaimana hal tersebut dapat terkoneksi dengan jaringan gerakan lainnya. Upaya ini bertujuan untuk membangun kekuatan menghadapi ketimpangan relasi kekuasaan dan marginalisasi yang terjadi secara struktural. Walaupun demikian, seperti gerakan sosial pada umumnya, gerakan para petani selalu mengalami pasang-surut.

Hal ini terutama bahwa para petani masih teralienasi oleh aktivitas pemenuhan kehidupan sehari-hari, sehingga menyulitkan mereka untuk intens dalam aktivitas-aktivitas Solipetra.

Selain peran struktural, YLBHI-LBH Manado juga melaksanakan peran institusional. Hal ini berkaitan dengan bagaimana YLBHI-LBH Manado menyediakan akses bantuan hukum gratis untuk membawa permasalahan para petani di Kalasey Dua dalam mekanisme formal peradilan. Walaupun demikian, dibanding peran struktural, mereka menganggap peran yang kedua ini secara pesimis. Menurut mereka, hal itu karena sistem peradilan Indonesia masih berkarakter predatorial yang rawan manipulasi. Kekuatan-kekuatan dominan dengan berbagai sumber daya bisa membangun kolusi untuk menguntungkan kepentingan mereka. YLBHI-LBH Manado, dengan demikian menganggap mekanisme peradilan bukanlah proses netral yang bebas dari pengaruh kekuasaan (wawancara, Satryano

Pangkey, YLBHI-LBH Manado, 05 Juni 2022).

Mekanisme peradilan menjadi jalan terakhir untuk ditempuh apabila dalam berbagai pertimbangan hal tersebut dibutuhkan. Mereka mempunyai keyakinan ideologis, bahwa bantuan hukum harus dilakukan secara struktural karena proses-proses subordinasi dan eksklusi masyarakat marginal juga terjadi secara struktural yang berkaitan dengan beragam macam faktor seperti kepentingan, kekuasaan, dan corak ekonomi-politik tertentu. Dalam doktrin ideologis mereka hal ini disebut sebagai Bantuan Hukum Struktural (BHS), yaitu gagasan yang terinspirasi dari pengacara dan intelektual publik yang juga pendiri YLBHI seperti Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulia Lubis, yang pada intinya adalah upaya untuk mengubah bentuk penindasan struktural menjadi tatanan sosial yang setara dan berkeadilan lewat bantuan-bantuan hukum dengan pendekatan struktural (Lubis, 1986; Lev: 1987).

Dalam konteks YLBHI-LBH Manado, mereka membawa masalah struktural di Kalasey Dua kedalam mekanisme peradilan formal. Bersama para petani, mereka mengumpulkan bukti-bukti sebagai materi perkara yang menguatkan kepemilikan para petani atas lahan. Mereka menjadikan Surat Keputusan Hibah Gubernur No. 368/2021 sebagai objek gugatan. Akan tetapi, pada tanggal 26 Juli 2022, hakim PTUN Manado memutuskan gugatan tidak diterima dengan pertimbangan syarat-syarat administratif yang kurang. Mempertimbangkan hasil putusan tersebut, YLBHI-LBH Manado dan para petani berupaya banding dengan menutupi sebisa mungkin celah yang dapat menyebabkan hasil keputusan tidak menguntungkan posisi para petani.

Peran institusional ini, walaupun menyediakan akses hukum terhadap masyarakat, ia tidak bisa hanya menjadi sebuah target jangka pendek dengan adanya hasil-hasil keputusan hukum yang menguntungkan posisi petani. Lebih dari

itu, peran institusional lewat penyediaan secara kelembagaan bantuan hukum dalam sistem peradilan formal, harus merupakan upaya-upaya berkelanjutan yang tidak terpisah dari peran struktural untuk merubah tatanan menjadi kondisi yang relatif setara. Itu artinya, putusan hukum, baik yang menguntungkan atau merugikan, tidak dapat menjadi faktor penentu bagi sukses atau gagalnya proses reorganisasi masyarakat marginal.

Dengan demikian, gerakan perlawanan para petani terhadap struktur kekuasaan harus mengacu pada proses-proses berkelanjutan dengan pendekatan struktural. Peran institusional, jika menguntungkan, tidak dapat selalu berkorelasi secara positif dengan peningkatan kekuatan dan kekuasaan para petani. Kekuatan dan kekuasaan para petani justru ditentukan oleh proses-proses struktural seperti penciptaan kesadaran politik, militansi, dan kendaraan politik yang solid seperti organisasi rakyat.

Walaupun YLBHI-LBH Manado dalam kasus ini punya peran yang penting, pada faktanya, kelompok sosial penentang yang mereka bangun tetaplah marginal dan tidak signifikan. Peran mereka, baik secara struktural maupun institusional, belum berhasil membentuk sebuah gerakan yang secara material signifikan. Gabungan dari berbagai kekuatan masyarakat sipil di mana Kalasey Dua sebagai arena pertarungannya, pada faktanya hanya merupakan kekuatan marginal yang diperhadapkan oleh struktur kekuasaan dominan beserta kelit-kelindan kepentingannya. Hal itu beralasan karena *pertama*, tidak adanya suatu artikulasi politik emansipatif yang memiliki tujuan dan capaian yang jelas. Konstruksi gerakan yang dibangun masih terbatas pada capaian-capaian jangka pendek, seperti penataan kembali organisasi rakyat Solipetra, melakukan aktivitas-aktivitas yang tujuannya hanya menumbuhkan semangat dan solidaritas, serta kelompok mahasiswa dan elemen lainnya yang melakukan “hidup bersama” tanpa

mengetahui tujuan serta capaian dari aktivitas itu. Sedangkan kesadaran untuk memproyeksikan gerakan pada suatu titik yang dapat mengubah secara struktural tidak dilakukan. Alih-alih berupaya membentuk kemungkinan perubahan struktural, yang ada hanyalah harapan-harapan kosong seperti “batalkan SK hibah Gubernur”. Gerakan ini hanya merepetisi format-format gerakan sebelumnya tanpa mampu mentransformasikan gerakan tersebut ke taraf yang emansipatif yang tujuannya membalikkan kondisi struktural, di mana para petani mendapatkan pengakuan atas kedaulatan mereka untuk menguasai lahan. Proses ini merupakan perjuangan yang berupaya mencapai dua kemungkinan sekaligus, yaitu pengakuan dan redistribusi.

*Kedua* adalah, para petani yang rentan diperdaya secara politik oleh kekuatan politik predatorial. Kehadiran jaringan gerakan yang dipromotori oleh YLBHI-LBH Manado di Kalasey Dua harus melihat ini sebagai suatu

permasalahan krusial apabila ingin merubah ketidakmampuan tersebut menjadi kekuatan signifikan. Hal ini terutama harus diantisipasi pada saat momen politik elektoral itu tiba. Di sini diperlukan tidak sekedar militansi dan keberpihakkan, tetapi juga kemampuan menjadikan jaringan gerakan tersebut terintegrasi dalam suatu bentuk representasi politik alternatif, tanpa memberi harapan lebih dalam pada representasi formal yang dimulai lewat kontestasi elektoral. Ketidakmampuan menjadikan gerakan sebagai alternatif politik dapat berbuah fatal, di mana para petani akan menganggap bahwa jalan politik formal dengan memilih kandidat saat momen elektoral dianggap masih dan akan membantu memperbaiki kondisi mereka. Hal tersebut inern dalam politik elektoral, di mana kontestan dapat mencitrakan diri sebagai pahlawan untuk masyarakat. Heroisme manipulatif itu harus dibendung dengan bangunan gerakan yang kokoh dari serbuan politik elektoral yang melemahkan.

Ketidakmampuan yang *ketiga* adalah bangunan kekuasaan yang asimetris antara YLBHI-LBH Manado berserta jaringan gerakan di Kalasey Dua dengan kekuasaan dan kepentingan predatorial lokal. Kekuasaan predatorial lokal serta kepentingannya berada dalam posisi strategis dengan menggunakan otoritas kekuasaan pemerintahan lokal untuk memastikan proses peminggiran berjalan tanpa resistensi yang signifikan. Selain itu, otoritas ini juga tidak dipergunakan sebagai instrumen mewujudkan tata kelembagaan pemerintahan yang demokratis dengan menghargai kedaulatan para petani atas lahan garapan. Ragam janji dari sebuah proyek bernama *goodgovernance* dengan partisipasi komunitas lokal sebagai salah satu spiritnya, nyatanya tidak mampu secara material diterapkan apabila harus diperhadapkan dalam sebuah kondisi: merengkuh masyarakat marginal atau kehilangan akses dan kepentingan predatorial. Sedangkan disisi yang lain, kekuatan masyarakat sipil tersebut tidak

dapat mengimbangi praktik predatorial ini, sehingga semakin menegaskan posisi mereka yang marginal.

Kasus Kalasey Dua memperlihatkan, betapapun krusial peran yang dimainkan kekuatan masyarakat sipil lokal, nyatanya selalu disubordinasi oleh kekuatan dominan yang berupaya meraih kontrol dan dominasi untuk melestarikan kepentingan-kepentingan predatorial dengan memangsa para petani dengan klaim-klaim sepihak atas tanah yang dikelola para petani sejak lama. Dihimpit oleh kekuasaan semacam itu, membuat kekuatan sosial masyarakat serta jejaring gerakan yang dipromotori oleh YLBHI-LBH Manado melakukan ragam agensi politik untuk melawan hal tersebut. Tetapi, ketidakmampuan untuk mentransformasikan gerakan semacam ini kearah yang emansipatif dan memiliki proyeksi politik yang jelas serta capaian-capaian tertentu, membuat proses-proses perlawanan ini harus puas dengan mengakui betapa tak tergoyahkan tatanan kekuasaan lokal tersebut.

#### **f. Reorganisasi dan Kelemahan Gerakan YLBHI-LBH Manado**

Jika kita melihat konfigurasi gerakan pro-demokrasi di Sulawesi Utara, terutama Manado sebagai episentrumnya, hal yang akan nampak adalah YLBHI-LBH Manado menempati posisi sentral untuk membentuk dan mengartikulasikan aktivisme pro-demokrasi. Bisa dikatakan, YLBHI-LBH Manado menjadi satu-satunya NGO lokal yang sangat aktif dalam perjuangan-perjuangan demokrasi. Hal ini tidak bisa lepas dari pengaruh aktor-aktor yang ada di dalam organisasi tersebut. Selain berlatar belakang profesional seperti pengacara, hampir semua dari mereka memiliki latar belakang aktivisme yang sangat kuat sejak mahasiswa. Hal ini kemudian berpengaruh secara institusional dan mendorong lembaga ini menjadi proponen utama perjuangan demokrasi, terutama di aras lokal. Dari aktivitas mereka untuk mendorong dan membela demokrasi, mereka menghimpun berbagai kekuatan sosial lainnya yang memiliki spirit yang

sama. Kekuatan yang berhasil dihimpun tersebut mayoritas adalah kelompok-kelompok mahasiswa dari berbagai organisasi. YLBH-LBH Manado menjadikan kelompok-kelompok mahasiswa ini sebagai bagian dari aliansi perjuangan. Proses ini adalah upaya untuk mereorganisasi kekuatan, yaitu melalui cara yang mereka sebut sebagai “jejaring”: menghimpun kekuatan dengan menjaring kekuatan sosial lainnya yang memiliki spirit yang sama.

Dengan demikian, kedekatan YLBHI-LBH Manado terutama dengan kelompok mahasiswa merupakan sebuah proses yang telah menyejarah sedemikian rupa. Proses ini telah melewati dinamika pertarungan politik yang objektif, dimana secara dialektis didasarkan pada perjuangan demokrasi dan negasi terhadap tatanan yang tidak demokratis.

YLBHI-LBH Manado juga menjadi lembaga proponent untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Mendorong kondisi terciptanya kondisi yang baik atas hak asasi

manusia di aras lokal menjadi agenda perjuangan mereka. Salah satu tindakan untuk mendorong hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana YLBHI-LBH Manado menggunakan kapasitas jejaring gerakannya untuk membentuk Aksi Kamisan Manado pada 2019. Hingga saat ini, Aksi Kamisan Manado telah melaksanakan lebih dari 30 aksi simbolik untuk mengkampanyekan pelanggaran hak asasi manusia. Selain fokus pada isu hak asasi manusia, mereka juga sering mengangkat isu-isu lokal untuk dikampanyekan.

Aktivist-aktivis YLBHI-LBH Manado lah yang menjadi orang pertama untuk mengajak jejaring gerakan mengkonsolidasikan diri untuk membentuk Aksi Kamisan Manado. Hingga saat ini, aktivis YLBHI-LBH Manado merupakan aktor yang menggerakkan kelompok tersebut. Mereka merangkul jejaring gerakan yang mayoritas adalah kelompok-kelompok mahasiswa. Akan tetapi, hal ini dinilai mengkhawatirkan karena

kecenderungan ketergantungan kelompok ini terhadap YLBHI-LBH Manado itu sendiri (wawancara, Satryano Pangkey, YLBHI-LBH Manado: 05 Juni 2022). Proses-proses koordinasi Aksi Kamisan Manado ini bergantung pada aktivis YLBHI-LBH Manado, misalnya dalam hal perencanaan aksi. Kecenderungan di mana aktivis YLBHI-LBH Manado memainkan peran dominan di dalam kelompok ini menandakan suatu masalah mengenai belum mampunya YLBHI-LBH Manado memandirikan jejaring gerakan yang selama ini telah mereka bangun (wawancara, David Wungkana, YLBHI-LBH Manado: 03 April 2022).

Bagi YLBHI-LBH Manado, pembangunan jejaring gerakan adalah strategi yang penting dalam kondisi gerakan masyarakat sipil Sulawesi Utara yang melemah:

“kami (YLBHI-LBH Manado) sadar bahwa kami tidak bisa berjuang sendiri. Kepemimpinan YLBHI-LBH Manado adalah

kepimpinan gagasan. Ketika kami bisa menjaring kawan-kawan lain untuk bersolidaritas bagi kami itu adalah sebuah keberhasilan...peran jejaring itu penting karena kami menilai gerakan masyarakat sipil di Sulawesi Utara melemah” (wawancara, Satryano Pangkey, YLBHI-LBH Manado: 05 Juni 2022).

Akan tetapi, mereka mengakui bahwa masih ada kontradiksi-kontradiksi internal dalam jejaring gerakan tersebut. Hal itu meliputi adanya sentimen-sentimen yang didasarkan pada organisasi, solidaritas yang belum menjangkau secara luas, adanya keterlibatan beberapa NGO yang sifatnya predatorial, serta gerakan yang masih belum mampu berkelanjutan (wawancara, Satryano Pangkey, YLBHI-LBH Manado: 05 Juni 2022). Mereka juga menyadari ketidakmampuan membangun aksi kolektif yang berkelanjutan ini akan semakin menempatkan gerakan masyarakat sipil di

Sulawesi Utara pada posisi marginal dan tak berdaya. “Konsolidasi-konsolidasi yang kami buat, misalnya Solidaritas untuk Bumi, Forum Kajian Ekologi Sulawesi Utara, pada akhirnya tidak berjalan sampai saat ini. Termasuk aksi-aksi seperti penolakan RKUHP dan Omnibus Law (wawancara, Satryano Pangkey, YLBHI-LBH Manado: 05 Juni 2022).

Terdapat kelemahan, baik secara struktural maupun institusional yang dialami YLBHI-LBH Manado. Kelemahan struktural dapat diamati dengan bertahunnya bangunan gerakan yang rapuh, terfragmentasi, dan tidak koheren. Kelemahan-kelemahan struktural yang dialami oleh YLBHI-LBH Manado pada dasarnya bersumber pada kontradiksi-kontradiksi internal yang muncul pada saat proses reorganisasi kekuatan mereka. Keadaan ini kemudian menjadikan kekuatan YLBHI-LBH Manado itu sendiri tidak dapat menjadi kekuatan yang bisa menandingi struktur kekuasaan dominan. Pada dasarnya, gerakan yang telah mereka

bangun hanya terkonsentrasi pada kelompok kelas menengah (mahasiswa dan NGO). Dengan kata lain, mereka sendiri tidak mempunyai dukungan dari basis sosial yang luas. Walaupun ada, dukungan hanya muncul dari sebagian kecil kelompok-kelompok masyarakat teropresi yang mereka dampingi. Sedangkan sebagian besar kelompok-kelompok masyarakat marginal, seperti kelompok miskin perkotaan, kelompok buruh, kelompok tani, belum terkoneksi dengan sempurna dengan gerakan mereka. Dengan demikian, mereka belum memiliki basis sosial pendukung yang nyata.

Selain kelemahan-kelemahan struktural, YLBHI-LBH Manado juga harus mengalami kelemahan institusional. Hal paling mendasar dari kelemahan model ini adalah keterbatasan sumber daya material yang mereka miliki. Proyek-proyek *fundraising* yang mereka canangkan belum bisa banyak membantu lembaga ini untuk menutupi kebutuhan material mereka. Kemandirian sumber daya material

lembaga ini sangat penting untuk diwujudkan apabila mereka tetap ingin berdiri secara independen dan tidak bergantung pada donor yang sering kali menentukan arah dari NGO. Betapapun, adanya sumber daya material yang memadai dapat membantu secara organisasional, maupun dukungan-dukungan dalam gerakan. Walaupun demikian, keberlanjutan gerakan mereka tidak bergantung semata-mata pada ketersediaan sumber daya material. Selama ini, sumber daya material YLBHI-LBH Manado bergantung pada transfer pendanaan YLBHI di pusat yang mendapatkan donor, serta hibah dari pemerintah melalui program hibah terhadap organisasi bantuan hukum masyarakat marginal.

Baik kelemahan secara struktural maupun institusional, adalah faktor konstitutif yang melemahkan mereka dan jejaring gerakannya. Lemahnya gerakan inilah yang pada akhirnya membuat mereka belum menjadi kekuatan signifikan untuk

menjadi kekuatan tandingan terhadap kekuasaan di aras lokal.

## **PENUTUP**

Penelitian ini telah menunjukkan bagaimana keterkaitan antara proses-proses politik di aras lokal, yaitu dinamika kekuasaan dan kepentingan yang saling beresonansi dengan artikulasi politik demokratis dari kekuatan masyarakat sipil lokal. Proses desentralisasi pasca-Orde Baru diyakini dapat membuka peluang partisipasi masyarakat sipil lokal secara demokratis, pada faktanya, proses tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan lokal yang berupaya mempertahankan kepentingan dan kontrol terhadap sumber daya material lokal. Sehingga, keterlibatan masyarakat sipil lokal untuk memperjuangkan kepentingan sosial-demokrasi di aras lokal sangat ditentukan oleh dinamika kekuasaan lokal tersebut. Alih-alih menjalin hubungan harmonis antara negara, pasar, dan masyarakat sipil, iklim politik lokal justru

ditandai oleh pertarungan dari berbagai kekuatan.

Sebagaimana yang telah dibahas, kekuasaan lokal di Sulawesi Utara mengambil corak seperti terjadinya konsentrasi kekuasaan pada kekuatan politik kepartaian yang dominan. Konsentrasi kekuasaan ini dimungkinkan berkat posisi strategis ganda (*double position strategy*) yang dimiliki oleh elite lokal seperti Olly Dondokambey, di mana selain merupakan seorang Gubernur, juga adalah elite dalam partai, yaitu sebagai bendahara umum sekaligus pimpinan daerah PDI-P. Posisi dominan ini memungkinkan dirinya untuk melakukan kontrol dalam partai, yaitu dengan memasukkan anggota keluarganya ke dalam partai tersebut. Kekuasaan yang telah terbangun melalui kekuatan berbasis keluarga dalam partai ini kemudian digunakan untuk melakukan kontrol terhadap institusi-institusi demokratis, baik birokrasi eksekutif, atau bahkan lembaga legislatif. Formasi kekuasaan yang

demikian memungkinkan bagi kekuasaan lokal ini untuk melakukan kontrol dan menanamkan kepentingannya di daerah.

Formasi kekuasaan lokal yang demikian menyulitkan kekuatan masyarakat sipil lokal untuk menjadi kekuatan tandingan dari kekuatan kekuasaan lokal dominan tersebut. Sebagaimana pengalaman YLBHI-LBH Manado, perjuangan demokratis yang mereka artikulasikan selalu dihadapkan pada kekuasaan lokal. Hal ini secara jelas terlihat dalam kasus di desa Kalasey Dua, di mana faktor-faktor struktural seperti kontrol sumber daya dan kepentingan dari kekuasaan lokal membuat posisi mereka marginal. Lewat kebijakan-kebijakan pemerintah lokal dengan semangat pembangunan, berimplikasi pada tercerabutnya sumber daya material yang dimiliki oleh para petani sebagai kelompok masyarakat marginal. Kehadiran YLBHI-LBH Manado dalam kasus ini pada faktanya belum mampu membalikkan struktur kekuasaan ini akibat berbagai

kelemahan yang sudah inheren dalam gerakan yang mereka bangun. Peran yang mereka berikan, baik peranan struktural maupun institusional, secara relatif dapat dianalisis memberikan manfaat, akan tetapi tidak menjadi kekuatan penanding terhadap struktur kekuasaan lokal dominan.

Proses-proses reorganisasi kekuatan masyarakat sipil lokal yang coba dibangun oleh YLBHI-LBH Manado sebagai upaya menandingi kekuatan dominan lewat artikulasi politik demokratis tetap belum mampu tampil secara signifikan. Walaupun relatif berhasil menginklusi kekuatan gerakan seperti kelompok mahasiswa, pada kenyataannya gerakan ini tidak lepas dari ragam kontradiksi yang harus mereka hadapi. Kondisi ini kemudian memberikan berbagai macam kelemahan YLBHI-LBH Manado beserta jejaring gerakannya, yaitu kelemahan yang sifatnya struktural maupun institusional. Kontradiksi internal seperti pertentangan-pertentangan dalam gerakan, ketidakmampuan menciptakan proyeksi politik dan tujuan gerakan yang jelas,

fragmentasi, hingga faktor eksternal yang berkaitan dengan pengaruh kekuasaan, semakin menandakan bahwa jejaring ini adalah kekuatan perjuangan yang tidak koheren. Dalam keadaan seperti ini, mereka tidak menjadi kekuatan signifikan terhadap kekuasaan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antlooy, Hans. 2003. *Not Enough Politics! Power, Participation and the New Democratic Polity in Indonesia*. Dalam Edward Aspinall & Greg Fealy (ed.). 2003. *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*. Pasir Panjang: ISEAS.
- East Asia Minerals Corporation & Mining Associates. 2017. *Independent Technical Report on the Mineral Resource Estimates of The Binabase and Bawone Deposits, Sangihe Project, North Sulawesi, Indonesia*.
- Djati, Wasisto Raharjo. 2013. *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal*. *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*: Vol. 18, No. 2, Juli 2013: 203-231.
- Fukuyama, Francis. 1999. *Social Capital and Civil Society*. IMF Working Paper.
- Fonseca, Marco. 2016. *Gramsci's Critique of Civil Society: Toward of New Concept of Hegemony*. New York: Routledge
- Gramsci, Antonio. 2013. *Prison Notebook: Catatan-catatan dari Penjara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hadiz, Vedi R. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. California: Stanford University Press.
- Hadiz, Vedi R. & Richard Robison. 2014. *The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia*. Indonesia 96: 35-57.
- Hadiz, Vedi R. 2004. *Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspective*. Development and Change. 35(4): 697-718. DOI:[10.1111/j.0012-155X.2004.00376.x](https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2004.00376.x)
- Oligarchy in an Age of Markets*. New York: Routledge.
- Hadiz, Vedi R. 2003. *Power and Politics in North Sumatra: the Uncompleted Reformasi*. Dalam Edward Aspinall & Greg Fealy (ed.). 2003. *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*. Pasir Panjang: ISEAS.
- Hadiz, Vedi R. 2003. *Desentralisasi dan Demokrasi di Indonesia: Sebuah Kritik terhadap Perspektif Neo-Institutionalis*. Dalam Vedi R. Hadiz. 2005. *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Orde Baru*. (ed. Rahadi T. Wiratama). Jakarta: LP3ES.
- Hadiz, Vedi R. & Richard Robison. 2005. *Oligarki dan Kapitalisme*. Dalam Vedi R. Hadiz. 2005. *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Orde Baru*. (ed. Rahadi T. Wiratama). Jakarta: LP3ES.
- Hikam, Muhammad A.S. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Imam, R. Haryono. 2010. *Masyarakat Warga dalam Pemikiran Antonio Gramsci*. Dalam F. Budi Hardiman (ed.). 2010. *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lev, Daniel S. 1987. *Legal Aid in Indonesia*. Victoria: Centre of Southeast Asian Studies.
- Lubis, Todung Mulia. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. 2021. *State of Disorder: Privatised Violence and the State in Indonesia*. Singapore: Palgrave Mcmillan
- Mudhoffir, Abdil Mughis. 2022. "The Limits Of Civil Society Activism in Indonesia: The Case of the Weakening of the KPK. Critical Asian Studies. DOI: [10.1080/14672715.2022.2123019](https://doi.org/10.1080/14672715.2022.2123019)
- Mudhoffir, Abdil Mughis. 2020. *Negara, Kapital, dan Kepentingan Kelas: Menafsirkan Tesis Oligarki Richard Robison dan Vedi R. Hadiz*. Dalam Mudhoffir, Abdil Mughis & Coen Husain Pontoh (ed.). 2020. *Oligarki: Teori dan Kritik*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Migdal, Joel S. 2012. *State in Society: Studying How States and Society Transform and Constitute One Another*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mietzner, Marcus. 2021. *Meninjau Kembali Partai Politik di Indonesia: Eksklusivisme Sistemik, Personalisasi Pemilu, dan Merosotnya Demokrasi Intra-partai*. Dalam Eve Warburton &

- Thomas Power (ed.), *“Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?”*. Jakarta: KPG.
- Pratikno, 2005. *Exercising Freedom: Local Autonomy and Democracy in Indonesia*. Dalam Maribert Erb, Priyambudi Sulistiyanto, dan Carole Faucher, (ed) 2005. *Regionalism in Post-Suharto Indonesia*. London: RoutledgeCurzon.
- Pribadi, Airlangga. 2019. *The Vortex of Power: Intellectual and Politics in Indonesia’s Post Authoritarian Era*. Singapore: Palgrave Mcmillan.
- Rasyid, M. Ryaas. 2003. *Regional Autonomy and Local Politics in Indonesia*. Dalam Edward Aspinall & Greg Fealy (ed.). 2003. *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*. Pasir Panjang: ISEAS.
- Robison, Richard. Vedi R. Hadiz. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. New York: Routledge.
- Robison, Richard. Vedi R. Hadiz. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. New York: Routledge.
- Sidel, John T. 2005. *Bossism and Democracy in the Philippines, Thailand and Indonesia: Towards an Alternative Framework for the Study of ‘Local Strongmen*. Dalam John Harris, Kristian Stokke, Olle Torquist (ed.), *“Politicizing Democracy: The New Local Politics of Democratisation”*.
- Sidel, John T. 1999. *Capital, Coercion, and Crime: Bossism in the Philippines*. Stanford: Stanford University Press.
- World Bank. 1983. *Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*. Washington D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- World Bank. 1999. *Decentralisation Briefing Notes*. Washington D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Internet:
- <https://www.worldbank.org/en/about/partners/civil-society/overview#:~:text=The%20World%20Bank%20Group%20works,political%2C%20scientific%2C%20religious%20or%20philanthropic> (diakses pada 27 Maret 2022).
- <https://www.manadoterkini.com/2022/03/92949/rio-dondokambey-terpilih-ketua-pemuda-gmim/> (diakses pada 24 Mei 2022).
- <https://manado.tribunnews.com/amp/2020/10/27/breaking-news-rio-dondokambey-terpilih-ketua-umum-kadin-sulut-2020-2025> (diakses pada 24 Mei 2022).
- <https://manadopost.jawapos.com/publika/23/06/2021/gubernur-angkat-bicara-terkait-pt-tms-od-sikap-saya-kalian-tahu/> (diakses pada 27 Juli 2022).